

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan (2006) Ensiklopedi Hukum Islam , Jakarta Pt Intermedia
- Amir Syarifuddin, 2008 *Ushul Fiqih Jilid 2*, Kencana, Jakarta,
- Asy-Syaikh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandhalawi,(2012), Muntakhob Ahadts Dalil-dalil Atas Enam Sifat Utama ,Cirebon Pustaka Nabawi
- Aksara. Wibawa, Samodra. dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo. Widodo,
- Abdul Azis Dahlan (2006) Ensiklopedi Hukum Islam , Jakarta Pt Intermedia
- Amir Syarifuddin, 2008 *Ushul Fiqih Jilid 2*, Kencana, Jakarta,
- Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal.213
- Asy-Syaikh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandhalawi,(2012), Muntakhob Ahadts Dalil-dalil Atas Enam Sifat Utama ,Cirebon Pustaka Nabawi
- Arikunto Suharsimi, Prof. Dr. 2010 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta : Rineka Cipta,
- Andrea Ata 2009 Ujian Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan,Kanisius Yogyakarta ,
- ABU SAMMAN LUBIS, SH.,MM. Widyaiswara Muda Balai Diklat Keuangan Pontianak
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abu Samman Lubis, SH.,MM. Widyaiswara Muda
- Breen, E., Perroud, T. (eds.) 2014. Corruption and Conflicts of Interest: A Comparative Law Approach, Edward Elgar, Cheltenham
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono Teguh. 2003. Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi.Semarang: Universitas Diponegoro.
- Balai Diklat Keuangan Pontianak alas; tumpuan; **benua** bagian dasar laut yang paling tepi; relief dasar laut yang menurun perlahan-lahan mulai dari pantai ke arah tengah lautan sampai ke pinggir, tempat dasar laut tiba-tiba menurun; paparan benua;

Band Hernoko, Agus Yudha, 2008 Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Leksbang Mediatama, Yogyakarta, LKPP. 2009. Substansi Pengadaan Barang dan Jasa. Buku II.

Duswara, Dudu, M. 2000 Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, PT Refika Aditama,

Dr. Abdul Hayy al Farmawi 2002 Metode Tafsir Maudhui dan cara penerapannya Cv Pustaka Setia Jl. BKR (Lingkar Selatan No.162-164 Bandung

Dr. Ali Anwar, M.Si, Drs. Tono TP, 2005 Rangkuman Ilmu Perbandingan Agama dan Filsafat, Pustaka Setia Bandung,

Dr. H.A. Khisni, SH, MH (2017), Perkembangan Pemikiran Hukum Islam (Ikhtiyar Pendidikan Doktor Membekali Calon Mujtahid Menggali Maqashid al Syari'ah untuk mewujudkan Hukum Islam Yang Kontekstual) Semarang Unissula Press;

Drs. Rosihan Anwar M.Ag, Drs. Abdul Rozak, M.Ag, 2001 Kamus Istilah Teologi Islam, pustaka Setia Bandung

Dr. Theo Huijbers. Filsafat Hukum, Pustaka Filsafat, Kanisius Yogyakarta 1995

Dedi Supriyadi, M.Ag ,2007 Sejarah Hukum Islam (Dari kaawasan Jazirah Arab sampai Indonesia) Cv. Pustaka setia Bandung

Dedi Supriyadi, M.Ag ,2007 Sejarah Hukum Islam , Cv. Pustaka setia Bandung

Dr. Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, Pustaka Setia Bandung, 2005

Dr. H.A. Khisni, SH, MH (2017), Perkembangan Pemikiran Hukum Islam (Ikhtiyar Pendidikan Doktor Membekali Calon Mujtahid Menggali Maqashid al Syari'ah untuk mewujudkan Hukum Islam Yang Kontekstual) Semarang Unissula Press;

Dr. Badri Yatim, MA 1996 Sejarah Peradab Islam (Dirasah Islamiyah II, Raja Grafindo Persana Jakarta

Duswara, Dudu, M. 2000 Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, PT Refika Aditama,

Djojosoekarto, A. 2008. E-Procurement di Indonesia: Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik, Partership Kemitraan dan LPSE Nasional, Jakarta

Fuady, Munir. 2005 Perbandingan Hukum Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti,

Gordon, I.D. "Protecting the Integrity of the US Federal Procurement System: Conflict of Interest and Aspects of the System that Help Reduce Corruption" pada Auby, J.B.,

Graycar, A. and Prenzler, T. 2013. Understanding and Preventing Corruption. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Haryati, D., Anditya, A. dan Wibowo, R.A. 2011. "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta", Jurnal Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 2

Hijma, Jaap. "Force Majeure ('Overmacht') According to the Civil Code of the Netherlands".

Hijma, Jaap. "Nullity and Annulability According to the Civil Code of the Netherlands".

HR, Ridwan. 2002. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.

Izza Rohman, Tohirin el Ashry, Ma'ruf Muttaqien, Ervan Nurtawab, 2009 Buku Pintar Islam, Zaman Jl. Kemang Timur Jakarta,

Ibrahim, Johnny. (2011). Eksistensi Badan Hukum Di Indonesia Sebagai Wadah Dalam Menunjang Kehidupan Manusia. Law Review Vol. 11, No. 1, pp. 105-121.

Ibrahim, Johnny. (2011). Eksistensi Badan Hukum Di Indonesia Sebagai Wadah Dalam Menunjang Kehidupan Manusia. Law Review Vol. 11, No. 1, pp. 105-121.

Joko. 2006. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing

Jamal Wihono, Anis Mashdurohatun 2017 Hukum Kontrak dan etika Bisnis Undip Pres Semarang

James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.421

Jujun S. Suriasumantri, 2007 Filsafat Ilmu sebuah pengantar, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Kamil, H. Ahmad dan M. Fauzan. (2004). Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi. Jakarta: Kencana. Muntakhob Ahadts Dalil-dalil Atas Enam Sifat Utama ,Cirebon Pustaka Nabawi

Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa;

KUHAP dan Penjelasannya, (2006) Asa Mandiiri

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.

Kinayati, Djojuroto & M.L.A Sumaryati. 2004. Prinsip-prinsip Penelitian Bahasa dan Sastra. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia.

Lima Undang-undang Penegak Hukum Dan Keadilan, Fokus Media Bandung, 2004

Lubis, Abu Samman. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Malang: Lembaga Pengembangan Insan Indonesia.

Mudji Santoso (2017) Kesalahan Pengadaan (Perspektif Hukum) Yogyakarta Cv Primaprint

Marzuki, Peter Mahmud, 2009 Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Grup,
Muhammad, Abdulkadir, 1982 Hukum Perikatan, Alumni, Bandung,

Moleong, Lexy.J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mudjisantoso,2014 *Memahami Kontrak Pengadaan Pemerintah Indonesia*, CV Primaprint, Yogyakarta

Machmudin, Dudu Duswara. 2003. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Refika. LKPP. 2009. Substansi Pengadaan Barang dan Jasa. Buku II.

N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.469.

Prinst Darwan, 1995 Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara, Bandung, Citra Aditya Bakti, .

Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa,

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Prof Dr. Hj. Musyifah Sunanto.2007 Sejarah Islam Klasik (Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam) Kencana Media Group Jl. Tambora Raya No 23 Jakarta,

Prof.Dr. C. Dewi Wulansari,SH,MH,Se,MM, 2009 Sosiologi Konsep dan Teori, PT Reika aditama Bandung,

Prof Dr. Cecep sumarna (2016) Filsafat Pengetahuan Bandung PT Remaja Rosdakarya

Prof Dr. Cecep sumarna (2017) Teologi Bisnis m elacak Jejak Nalar Entrepreneur, Bandung PT Remaja Rosdakarya

Prof.Dr.H. Ismail Muhamad Syah,SH,dkk,1992 Filsafat Hukum Islam, Bumi Aksara Jakarta,

Prof.Dr. H. Juhaya S.Praja, (2009) Teori-teori Hukum suatu Telaah Perbandingan Dengan Pendekatan Filsafat, Bandung Pascasarjana UIN

Prof.Dr. H. Juhaya S.Praja,2008 Aliran-aliran Filsafat dan Etika ,Prenada Media Jakarta

Prof.Dr. H. Juhaya S.Praja, 2004 Filsafat Hukum Islam, Lathifah Pres dengan Fakultas Syari'ah IAILM-Suralaya Tasikmalaya,

Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, SH,M.Hum, 2008 Sejarah sosial hukum IslamTsabita

Poerwadarminta, W.J.S.,1976 Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta,

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Prof .Dr.Moh.Mahfud MD, (2016) Politik Hukum di Indonesia , Jakarta PT Raja Grafindo Persada

Pro.Dr. Teguh Prasetyo,SH.MSi, Dr.Abdul Halim Barkatullah,S.Ag, SH,M Hum, Filsafat,Teori dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang berkeadilan dan Bermartabat, Jakarta PT Raja Grafindo Persada;

Peter Beilharz (ed), 2002, Teori-teori Sosial ; Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.192-193.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011, Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa TPemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012, Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Purba, Orinton. (2011). Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar dari Jerat Hukum. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Peraturan Lengkap Pengadaan Barang/ Jasa (Perpres RI No.6 tahun 2015 (2017) Jakarta Sinar Grafika

Prinst Darwan, 1995 Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara, Bandung, Citra Aditya Bakti,

Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.

Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tentang Organisasi dan Prosedur Polri di tingkat Polda;

Peter Beilharz (ed), 2002, Teori-teori Sosial ; Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.192-193.

Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa, 1979.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2014

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012

Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa. Jakarta: NLRP, 2010.

Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian. Jakarta: NLRP, 2010.

Rahardjo,Mudjia.2011.<http://www.mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/329-fungsi-teori-dan-state-of-the-arts-dalam-penelitian.html> (diakses tanggal 29 Maret 2013)

Rahardjo,Mudjia.2012.<http://www.mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/414-manfaat-kajian-pustaka-dalam-penelitian.html> (diakses tanggal 29 Maret 2013)

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet ke-IV, Bandung, Pustaka Setia, 2010

Ridwan,2002 Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta,

Syekh Abdul Wahab Khallaf, 2005 Ilmu Ushul Fikih Rineka Cipta Jakarta

Simamora, Yohanes Sogar, 2009, Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, LaksBang Pressindo, Yogyakarta. Utrecht, E., Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.

Subekti R, 1979 Aneka Perjanjian, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1992. Pokok-

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2012). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti, S. H dan R. Tjitrosudibio. (1980). KUH Perdata. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Sekh H.Abdul Halim Hasan Binjai (2006) Tafsir Al-Ahkam, Jakarta Prenada Media Group

Sudarto. (1983). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung: Sinar Baru.

Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan (2005) Ringkasan Fikih Lengkap, Jakarta Darul Falag

Sayyid Sabiq (2009) Fiqih Sunnah, Jakarta PT. Pena Pundi Aksara

Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri (2007) Enslokopedi Islam Al-Kamil . Jakarta Darus Sunnah

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Subekti R, 1992 Aneka Perjanjian, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,

Soemadipradja, Rahmat S.S. 2010 Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa. Jakarta: NLRP,

Subekti. Hukum 2005 Perjanjian. Cet. Ke-21. Jakarta: Intermasa, Suharnoko.2009 Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus. Ed. 1. Cet.6. Jakarta: Kencana,

Tim Penyusun, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.829

Tiga Kitab Undang-Undang Hukum KUHP, KUHP dan KUHP beserta Penjelasan, (2017) Jakarta Bhana Ilmu Popular ;

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-undang No. 7 Drt 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang “Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), “The Fraud Triangle”, available from: <http://www.acfe.com/fraud-triangle.aspx>, terakhir diakses 20 Juli 2015

Jansen, C., Janssen, J, Muntz-Beekhuis, J. 2014. “Extra-Judicial Complaints Review: First Experiences of the Dutch Public procurement Experts Committee”, paper

presented at the 6th International Public Procurement Conference, Dublin City University, Dublin

Jasin, dkk. 2007. Memahami Untuk Melayani: Melaksanakan e-Announcement dan e-Procurement dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta

Jansen, C., Janssen, J, Muntz-Beekhuis, J. 2014. “Extra-Judicial Complaints Review: First Experiences of the Dutch Public procurement Experts Committee”, paper presented at the 6th International Public Procurement Conference, Dublin City University, Dublin

Jasin, dkk. 2007. Memahami Untuk Melayani: Melaksanakan e-Announcement dan e-Procurement dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta

Kassem, R and Higson, A. 2012. “The New Triangle Model” Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS) 3(3)

Kruisinga, Sonja diunduh 13 November 2012 A. “The Impact of Uniform Law on National Law: Limits and Possibilities – CISG and Its Incidence in Dutch Law”, <http://www.ejcl.org/132/art132-2.doc> ,

Low, Juanita May. diakses 13 November 2012. “United Kingdom: Force Majeure – The Clause, The Definition, The Application ”, <http://www.mondaq.com/x/159974/Contract+Law/Force+Majeure+The+Clause+The+Definition+The+Application> ,.

O’Malley, Nathan D. “Key diakses 13 Novermber 2012. Differences Between U.S. and Netherlands Contract Law”, <http://www.conway-partners.com/en/blog/international-contracting-/key-differences-between-us-and-netherlands-contract-law> ,.

S.n., “Default”, <http://www.lectlaw.com/def/d024.htm> , diakses 13 November 2012

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

<https://krisnaptik.com/polri-4/teori/teori-hukum-dan-pengertian/>

<http://penerbitbukudeepublish.com/shop/keadilan-berdasarkan-pancasila>

<http://ugun-guntari.blogspot.co.id/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum.html>

<https://id.wiktionary.org/wiki/rekonstruksi>

<http://blogbahrul.wordpress.com/2007/11/28/landasan-teori-kerangka-pikir-dan-hipotesis-penelitian/>

<http://kamriantiramli.wordpress.com/2011/05/16/landasan-teori-kerangka-berfikir-dan-pengajuan-hipotesis/>

<http://contohskripsi-makalah.blogspot.com/2012/04/teknik-penyusunan-landasan-teori-atau.html>

<http://www.wikipedia.com> <http://www.hukumonline.com>

http://carapedia.com/pengertian_definisi_prinsip_info2118.html diakses tgl. 16-05-2014 pk. 11.09

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2013

